

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keabsahan Dokumen Persyaratan dari BPKAD Provinsi;</li> <li>2. Surat Gubernur mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;</li> <li>3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui Bersama DPRD;</li> <li>4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</li> <li>5. Surat Gubernur Kepada DPRD Provinsi mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi untuk dibahas bersama;</li> <li>6. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</li> <li>7. Risalah Sidang Jalannya Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</li> <li>8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>9. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;</li> <li>10. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis</li> </ol>

		pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
		11. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
		12. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
		13. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
		14. Laporan operasional;
		15. Laporan perubahan ekuitas;
		16. Neraca;
		17. Laporan arus kas;
		18. Catatan atas laporan keuangan;
		19. Daftar rekapitulasi piutang daerah;
		20. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
		21. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
		22. Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
		23. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
		24. Daftar rekapitulasi aset tetap;
		25. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
		26. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
		27. Daftar dana cadangan daerah;
		28. Daftar kewajiban jangka pendek;
		29. Daftar kewajiban jangka panjang;
		30. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
		31. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
		32. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
		33. Ringkasan Laporan Realisasi

		<p>Anggaran;</p> <p>34. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;</p> <p>35. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara (* jika ada);</p> <p>36. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (* jika ada); dan</p> <p>37. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan (* jika ada).</p>
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA <a href="http://ula.kemendagri.go.id">ula.kemendagri.go.id</a>; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Kepmendagri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. <a href="http://kemendagri.lapor.go.id">http://kemendagri.lapor.go.id</a></p> <p>2. Email: <a href="mailto:ula@kemendagri.go.id">ula@kemendagri.go.id</a>;</p> <p>3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;</p> <p>4. Fax: (021) 3440402;</p> <p>5. Kotak Saran; dan</p> <p>6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.</p>